



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIBATU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIBATU TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 83**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KECAMATAN **KERJA
CIBATU
TAHUN 2023****

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

Renja SKPD/Kecamatan Cibatu Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

Bahwa Renja Kecamatan Cibatu merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehinggamemiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Kerja daerah, Rencana erja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Timebond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic Covid-19. Seperti yang kita ketahui penyebaran pandemic Covid 19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemic Covid 19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, dihapkan mulai bisa lepas dari tekanan Pandemi Covid 19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi Covid 19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dan penanggulangan Covid 19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi Covid 19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan Covid 19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya herd-immunity.
- b. Transaksi digital menjadi referensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktifitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapisan pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahunnya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan ditentukan tema pembangunan tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan ditentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu: **"Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat"** yang diturunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 sebagai bahan dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Rentra Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cibatu tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denagn undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam rangkamenghadaapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44104421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 28. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Coronavirus Disease* (COVID-19);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590 ;
 40. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa

- Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provisinsi Jawa Barat Nomor 252);
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 45. Pemerintah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 52. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
 53. Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
 54. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
 55. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibatu tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cibatu guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibatu tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cibatu;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibatu Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cibatu sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cibatu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibatu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cibatu selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cibatu Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan:
- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
- a. Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan:
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan:
- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 (dua puluh dua) sub Kegiatan terdapat 6 (enam) sub kegiatan (27,27%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS (89,99%)

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik (63,30%)
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (91,95%)
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (97,73%)
5. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (97,42%)
6. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal (99,25%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota			
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1.655.671.814	1.489.954.760	89,99
2.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	22.956.000	14.532.104	63,30
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.032.600	20.258.850	91,95
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.962.000	114.305.500	97,93
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di			

	Tingkat Kecamatan			
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.102.700	217.338.800	97,42
III.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	96.168.900	95.448.900	99,25

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2021

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 (dua puluh dua) Kegiatan terdapat 16 (enam belas) Kegiatan (72,73%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%)
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD (100%)
3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (100%)
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (100%)
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100%)
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%)
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)
9. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor (100%)
11. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Cibatu (100%)
12. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (100%)

13. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (100%)
14. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100%)
15. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (100%)
16. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan (100%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Uraian	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.081.600	3.081.600	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	100,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	9.755.600	9.755.600	100,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	58.424.559	58.424.559	100,00
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.970.400	22.970.400	100,00
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.363.000	4.363.000	100,00
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.000.000	32.000.000	100,00
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.760.000	44.760.000	100,00
4.	Penyeiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.720.000	5.720.000	100,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	10.378.700	10.378.700	100,00
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan			

	Publik			
1.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			
	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan Cibatu	43.139.400	43.139.400	100,00
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6.301.000	6.301.000	100,00
2.	Pemberdadaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.298.000	12.298.000	100,00
IV.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Derah			
	1. Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000	200.000.000	100,00
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.626.000	4.626.000	100,00
	2. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	11.059.500	11.059.500	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2021

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
 - c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cibatu pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cibatu.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah





Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Cibatu merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cibatu selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Cibatu tahun lalu (tahun 2022) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	Triwulan 1				
						Triwulan 2	80	80,10	100,125	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						Kondisi Akhir (F)		80,10	100,125	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	B	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	CC	58,36	
						Kondisi Akhir (F)		58,36	58,36	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Cibatu sampai dengan bulan Juli tahun 2022, terdapat 1 (satu) sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir belum mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100,125%. Hal tersebut membuktikan bahwa

komitmen kecamatan cibatu dalam pelayanan publik bersungguh-sungguh sebagaimana ekspektasi Bupati yang tertuang pada RPJMD tahun 2019-2024. Selain menggunakan form manual yang telah ada dibuatkan juga survey dengan menggunakan google form yang di sebar dengan hasil mendapat respon dari responden yang baik.

3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir belum mencapai target sesuai predikat B sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan mendapat predikat CC dari hasil review inspektorat.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cibatu

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan bulan Juni tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022) (triwulan 2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
7		Urusan Kewilayahan										
7	01	Kecamatan										
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	100%	48,12%	100%	87,70%	88%	100%	51,87%	100%
7	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	41,56%	100%	100%	100%	41,56%	100%

7	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
7	01	01	01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	-	41,56%	0%	0%	0%	100%	41,56%	100%
7	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	100%	45,61%	100%	87,46%	87%	100%	43,01%	100%
7	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96,55%	100%	87,43%	87%	100%	43,01%	100%
7	01	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan penyusunan akhir tahun	100%	0%	100%	99,58%	100%	100%	0%	100%
7	01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
7	01	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
7	01	01	06		Administrasi umum perangkat Daerah	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	%	100%	76,59%	77%	100%	45,15%	100%
7	01	01	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
7	01	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,70%	100%	99,86%	100%	100%	50%	100%
7	01	01	06	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item peralatan rumah tangga	100%	98,90%	-	-	-	100%	99,47%	
7	01	01	06	05	Penyediaan barang cetak dan penggunaan	Jumlah jenis penyediaan cetak dan penggunaan	100%	100%	100%	98,11%	98%	100%	49,37%	100%
7	01	01	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan an peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	92,34%	92%	100%	0%	100%

7	01	01	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	100%	99,04%	100%	60,61%	61%	100%	16,67%	100%
7	01	01	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	35,51%	36%	100%	28,26%	100%
7	01	01	06		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	%	100%	64,24%	64%	100%	40,36%	100%
7	01	01	06	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	80,32%	100%	57,02%	58%	100%	23,59%	100%
7	01	01	06	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan kantor dan perlengkapan	100%	63,94%	100%	90,38%	90%	100%	63,94%	100%
7	01	01	06	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor	100%	51,65%	100%	65,83%	66%	100%	51,65%	100%
7	01	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	-	0%	0%	0%	0%	100%	91,82%	100%
7	01	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	-	0%	0%	0%	0%	100%	91,82%	100%
7	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	%	100%	96,81%	97%	100%	33,87%	100%
7	01	01	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah uncut pembayaran STNK	100%	100%	100%	91,95%	92%	100%	33,87%	100%
7	01	01	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	100%	100%	100%	97,73%	98%	100%	0%	100%

7	01	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	28,80%	100%	77,78%	78%	100%	28,80%	100%
7	01	02	01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public	100%	0%	100%	78,38%	78%	100%	20,42%	100%
7	01	02	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	0%	100%	78,38%	78%	100%	20,42%	100%
7	01	02	02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan public yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	100%	100%	74,70%	75%	100%	46,65%	100%
7	01	02	02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanann kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	100%	46,65%	100%	74,70%	75%	100%	46,65%	100%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	54,46%	100%	75,22%	75%	100%	54,46%	100%
7	01	03	01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat deas/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	95,98%	100%	100%	100%	100%	95,98%	100%
7	01	03	01	01	Peningkatan partisipasi maysarakat dalam forum musyawarah	Jumlah dokumen RPTK	100%	95,98%	100%	100%	100%	100%	95,98%	100%

					perencanaan pembangunan di desa														
7	01	03	03		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	19,49%	100%	62,53%	66%	100%	19,49%	100%					
7	01	03	03	02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	19,49%	100%	62,53%	66%	100%	19,49%	100%					
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan bencana	100%	45%	100%	68,06%	68%	100%	45%	100%					100%
7	01	04	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan bencana	100%	48,60%	100%	48,60%	85%	100%	48,60%	100%					100%
7	01	04	01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia dan tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergitas dengan TNI/Polri	100%	48,60%	100%	68,06%	68%	100%	48,60%	100%					100%
7	01	04	01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pelaksanaan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	100%	0%	-%	-%	-%	100%	0%	100%					100%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100%	50,02%	100%	83,63%	84%	100%	50,02%	100%					100%
7	01	05	01		Penyelenggaraan urusan pemerintahn umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan kepada camat	100%	50,02%	100%	83,63%	84%	100%	50,02%	100%					100%

7	01	05	01	08	Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	50,02%	100%	83,63%	84%	100%	50,02%	100%
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase berkinerja baik desa	100%	40,47%	100%	9,56%	10%	100%	40,47%	100%
7	01	06	01		Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Persentase berkinerja baik desa	100%	40,47%	100%	9,56%	10%	100%	40,47%	100%
7	01	06	01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah monitoring penyusunan APBDes	100%	52.93%	100%	28.75%	29%	100%	52,93%	100%
7	01	06	01	04	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Razia	100%	33,25%	100%	1,54%	2%	100%	33,25%	100%

Sumber: realisasi anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cibatu sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Tahun Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			80	85	87	87	80,8	80,10	81		
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			82	83	85	87	-		85		
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			82%	85%	88%	100%	-		88		
4	Predikat SAKIP Kecamatan			C	C	B	BB	C	CC	B		

Sumber: SIPD Renstra

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cibatu ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan 36able36 penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai 36able36 penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Cibatu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Cibatu (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cibatu berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari

pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cibatu sebesar Rp. 2.881.186.828,-

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cibatu diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Cibatu mengusulkan 6 (enam) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Cibatu mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibatu

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7 01	KECAMATAN				2.881.186.828	KECAMATAN				2.881.186.828	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.208.066.919	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.208.066.919	
7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.728.736	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.728.736	
7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	7.473.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	7.473.400	

7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	500.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	500.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	500.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DKA-SKPD	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DKA-SKPD	1 dokumen	500.000

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	500.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibatu	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporann	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibatu	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	2 Dokumen	4.230.600
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.818.129.777	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.818.129.777
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cibatu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orangn/ bulan	1.812.684.777	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cibatu	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orangn/ bulan	1.812.684.777
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi	1 laporan	5.445.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi	1 laporan	5.445.000

						penyusunan laporan keuangan akhir tahun					penyusunan laporan keuangan akhir tahun			
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	22.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	22.800.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cibatu	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	29 paket	7.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cibatu	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	29 paket	7.800.000
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cibatu	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cibatu	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	15.000.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	227.365.537	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	227.365.537
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	1 paket	11.804.276	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	1 paket	11.804.276

							kantor						kantor				
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 pakets	70.693.715	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 pakets	70.693.715			
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	6.072.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cibatu	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	6.072.000			
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cibatu	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1 paket	27.794.184	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cibatu	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1 paket	27.794.184			
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	8.121.762	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	8.121.762			
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	38.720.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	38.720.000			
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	1 laporan	54.159.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	1 laporan	54.159.600			

					SKPD		dan konsultasi SKPD			SKPD		dan konsultasi SKPD			
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	51.659.8676	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	51.659.8676	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	26.680.390	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	26.680.390	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	6.921.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	6.921.200	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	1 laporan	18.058.277	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cibatu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	1 laporan	18.058.277	

							disediakan					disediakan			
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	81.383.001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	81.383.001	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibatu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	47.253.162	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cibatu	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 unit	47.253.162	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cibatu	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	3 unit	34.129.839	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cibatu	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	3 unit	34.129.839	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh	100 %	242.611.094	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh	100 %	242.611.094	

							Kecamatan								Kecamatan				
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	190.412.420	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	190.412.420					
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	190.412.420	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	190.412.420					

7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	52.198.674	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	52.198.674	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Ke. Cibatu	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	9 dokumen	52.198.674	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Ke. Cibatu	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	9 dokumen	52.198.674	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	19.390.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	19.390.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	15.434.210	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	15.434.210	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Cibatu	Junlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	8.106.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Cibatu	Junlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	8.106.000	

							di wilayah kecamatan					di wilayah kecamatan			
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1 laporan	11.580.580	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1 laporan	11.580.580	
7	01	03	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cibatu	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	260 orang	13.980.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cibatu	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	260 orang	13.980.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	159.575.400	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	159.575.400	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	159.575.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	159.575.400	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara	1 laporan	108.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Kec. Cibatu	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara	1 laporan	108.000.000	

					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan		
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cibatu	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat	1 Kegiatan	51.575.400	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cibatu	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat	1 Kegiatan	51.575.400
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	200.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimca	1 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cibatu	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimca	1 Dokumen	200.000.000

							m Terkait Covid-19					m Terkait Covid-19				
7	01	06					Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	29.416.100			Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	29.416.100		
7	01	06	2,01				Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	29.416.100			Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	29.416.100		
7	01	06	2,01	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 dokumen	8.351.400	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cibatu	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 dokumen	8.351.400
7	01	06	2,01	04			Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan	2 laporan	13.381.995	Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kec. Cibatu	Jumlah laporan fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan	2 laporan	13.381.995

							peraturan perundang-undangan					peraturan perundang-undangan				
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	7.828.200	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cibatu	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	7.828.200		
TOTAL									2.881.186.828						2.881.186.828	

Sumber: SIPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cibatu melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Cibatu mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Table 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2023
Kabupaten Garut

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN					
1.	Program Penataan Desa				
1.	Pemekaran Desa	Desa Cibunar	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	250.000.000 1 Paket	Setda
2.	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana Pendidikan				
1.	Pemagaran Sekolah SDN 2 Kertajaya	Kp. Sindangkerta Ds. Kertajaya	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	200.000.000 25 M ²	Disdik
2.	Pembangunan RA/TPQ/LPQ	Kp. Citambal Rw.02 Ds. Padasuka	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	200.000.000 1 unit	Disdik
3.	Pembangunan RKB SDN 2 Cibunar	Kp. Gentengpacing Rw.03 desa Cibunar	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	150.000.000 2 kelas	Disdik
4.	Pembangunan Pagar /TPT SDN 1 dan 2 Cibatu	Kp. Rancabatu Rt.03 Rw.07 Desa Cibatu	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	400.000.000 200 m ²	Disdik
3.	Program Pengelolaan Pendidikan				
1.	Bantuan Operasional PAUD/TK/Kober	Rw.01 s/d 16 se Desa Wanakerta	Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini	80.000.000 16 paket	Disdik
2.	Pembangunan MCK SDN 2 karyamukti	Kp. Dukuh Rw.05 Desa Karyamukti	Peningkatan Sarana Pendidikan	95.000.000 1 unit	Disdik
3.	Penataan Halaman SDN Karyamukti	Kp. Babakan Loa Rw.02	Peningkatan Sarana	100.000.000 5x10 m ²	Disdik

		Desa Karyamukti	Pendidikan		
4.	Pembangunan Gedung PAUD At-Taufik	Kp. Lembur Sawah Rt.02 RW.01 Desa Girimukti	Peningkatan Sarana Pendidikan	250.000.000 1 unit	Disdik
5.	Rehab Ruang Kelas SDN 1 Girimukti	Kp. Babakan Cilamo Rt.02 Rw.03 Desa Girimukti	Peningkatan Sarana Pendidikan	300.000.000 6 unit	Disdik
6.	Pemagaran SDN 2 Girimukti	Kp. Cidangdeur Girang Rt.02 Rw.04 Desa Girimukti	Peningkatan Sarana Pendidikan	150.000.000 500 m ²	Disdik
4.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
1.	Insentif Guru ngaji PAUD Masrasah	Dusun 1,2 dan 3 desa cibatu	Indek kesalehan sosial masyarakat	132.000.000 110 orang	Setda
2.	Pembangunan Sekretariat RW	Desa sukalilah	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	50.000.000 1 paket	Setda
3.	Insentif guru ngaji	Desa Cibunar	Indek kesalehan sosial masyarakat	35.000.000 70 orang	Setda
4.	Insentif guru ngaji	Se desa padasuka	Indek kesalehan sosial masyarakat	250.000.000 50 orang	Setda
5.	Insentif guru ngaji	Se desa kereseq	Indek kesalehan sosial masyarakat	80.000.000 80 orang	Setda
5.	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan				
1.	Pelatihan dan Pemberdayaan perempuan	Desa Sukalilah	Pemberdayaan perempuan	50.000.000 2 klp	Setda
6.	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum				
1.	Pembinaan/ Insentif LINMAS	Dusin 1,2 dan 3 desa cibatu	Peningkatan kapasitas SDM LINMAS	36.000.000 30 orang	Kesban gpol
7.	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				
1.	Insentif kader dasa wisma	Desa cibunar	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	35.000.000 70 orang	Setda
2.	Insentif kader dasa wisma	Desa padasuka	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	50.000.000 1 paket	Setda
3.	Pembinaan kader dasa wisma	Desa sukalilah	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	75.000.000 1 paket	Setda
8.	Program administrasi pemerintahan desa				

1.	Modal usaha BUMDES	Desa cibatu	Pembinaan dan pengawasan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	500.000.000 1 paket	DPMD
9.	Program Kesejahteraan dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga				
1.	Pembangunan lapang olah raga terpadu desa wanakerta	Kp. Wanakerta rw.04 desa wanakerta	Meningkatkan sarana prasarana olah raga	1.500.000.000	Dispora
10.	Program Rehabilitasi Sosial				
1.	Pemberian alat bantu disabilitas	Desa cibunar	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	70.000.000 20 orang	Dinsos
2.	Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	Desa sukalilah	Pemberian bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial	50.000.000 1 klp	Dinsos
II. BIDANG PSDA					
1.	Program Pemberdayaan UMKM				
1.	Bidang Ekonomi dan SDA	Kp. Sindangkerta rw.01 desa kertajaya	Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM	200.000.000 1 paket	Diskop
2.	Bidang Ekonomi dan SDA	Dusun 1,2 dan 3 desa kertajaya	Bantuan perkuatan modal usaha UMKM	200.000.000 16 paket	Diskop
2.	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata				
1.	Peningkatan akses agro wisata	Kp. Babakan kandang rw.16 desa wanakerta	Pengembangan daya tarik wisata	1.653.322.000	PUPR
2.	Pengembangan wisata desa silayung park	Kp. Dukuh desa karyamukti	Peningkatan perekonomian masyarakat	1.000.000.000 1 paket	Disparbud
3.	Pengembangan wisata	Kp. Ciseupan rw.04 desa sindangsuka	Pengembangan daya tarik wisata	500.000.000 1 paket	Dispadbud
4.	Desa wisata sabo dam	Sabo dam desa kereseq	Peningkatan perekonomian masyarakat	1.000.000.000 1 paket	Disparbud
5.	Pengembangan wisata religius	Kp. Bungarungkup rt.02 rw.11 desa girimukti	Peningkatan perekonomian masyarakat	500.000.000 1 paket	Disparbud
6.	Destinasi wisata pasir tuma	Kp. Bunisari rt.01 rw.03 desa mekarsari	Peningkatan perekonomian masyarakat	1.500.000.000 1 paket	Disparbud
7.	Pembangunan/reh	Rw.3,6 dan 10	Peningkatan	240.000.000	disparbud

	abilitasi sarana prasarana kebudayaan/ rumah adat keagamaan milik desa	desa padasuka	perekonomian masyarakat	3 unit	ud
8.	Pembangunan gapua desa	Rw.03-07 desa karyamukti	Pengembangan daya tarik wisata	100.000.000 2 unit	disparbud
3.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
1.	Pembangunan peningkatan jalan usaha tani	Kp. Cikarees rt.03 rw.10	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	200.000.000 3000 m ²	Distan
2.	Pembangunan jalan usaha tani	Kp. Rajapolah rw.07 desa sukalilah	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian budang pertanian	250.000.000 700 m ²	Distan
3.	Pengadaan peralatan pertanian	Rw.01-07 desa karyamukti	Meningkatkan produksi pertanian	300.000.000 7 paket	Distan
4.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi. Pengelolaan dan penggilingan)	Desa sukalilah	Pemberian alat pasca panen dan fasilitasi kemitraaan	150.000.000 5 klp	Distan
2.	Penangkaran benih padi	Desa cibunar	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	100.000.000 9 klp	Distan
3.	Budidaya jamur	Kp saradan rw.02 desasindangsuka	Pengembangan sarana pertanian	50.000.000 1 paket	Distan
5.	Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak				
1.	Budidaya peternakan	Desa keresekek	Meningkatkan ekonomi masyarakat	200.000.000 1 paket	Diskana k
2.	Budidaya ikan/lele	Rw.09 dan Rw.12 desa sindangsuka	Meningkatkan ekonomi masyarakat	100.000.000 1 paket	Diskana k
3.	Budidaya ternak domba	Rw.01 s.d Rw.13 desa sindangsuka	Meningkatkan ekonomi masyarakat	350.000.000 13 klp	Diskana k
4.	Pengembangan kelompok budidaya ikan	Desa mekarsari	Meningkatkan ekonomi masyarakat	60.000.000 6 klp	diskana k
6.	Program pengembangan kebudayaan				
1.	Pelatihan pencak	Rw.07 dan 11	Peningkatan	30.000.000	diskana

	silat	desa kereseck	perekonomian masyarakat	2 paket	k
2.	Pengadaan alat kesenian	Desa cibunar	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	100.000.000 2 klp	Disparbud
7.	Penciptaan dan pemberdayaan koperasi dan UKM				
	Pelatihan dan bantuan modal usaha pelaku UMKM	RW.01 s.d RW.09 Desa mekarsari	Pengembangan system pendukung usaha bagi KUMKM	100,000,000 10 paket	diskop
8	Program kesejahteraan dan sarana prasarana kepemudaan olahraga				
	Pembangunan lapang sepak bola	Kp. Cigaluh RW.04 Desa mekarsari	Peningkatan sarana prasarana olahraga	200,000,000 1 paket	DISPORA
	Pembangunan SOR dan lapang volley	RW.07,10,11,12 Desa kereseck	Peningkatan sarana prasarana olahraga	600,000,000 4 yunit	DISPORA
III	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
1.	Program Pengembangan Perumahan				
	Pembangunan TPT jalan desa	Kp.nyalindung RW.08 Desa kertajaya	Peningkatan kualitas lingkungan	200,000,000 300 M	PUPR
	Pembangunan TPT jalan desa	KP.Sindang kerta RW.01 Desa kertajaya	Peningkatan kualitas lingkungan hunian/pemukiman	200,000,000 200 M	PUPR
	Pembangunan TPT saluran irigasi cijeruk	KP,Sukamanah RW.07 Desa wanakerta	Meningkatnya pengelolaan irigasi	550,000,000 1500M	PUPR
	Pembangunan TPT	KP.Dukuh RW.05 Desa karyamukti	Peningkatan kualitas lingkungan hunian/pemukiman	500,000,000 500 M	PUPR
	Pembangunan TPT jalan desa	KP.bunga rungkuh RT.02 RW.11 Desa girimukti	Peningkatan mobilitas masyarakat	250,000,000 500 M	PUPR
	TPT jalan desa dan pengaspalan	RW.01,03 DAN 09 Desa sindangsuka	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	500,000,000 1200 M	PUPR
	Kirmir saluran	RW.03 Desa sindangsuka	Peningkatan kualitas lingkungan hunian/pemukiman	500,000,000 500 M	PUPR
2.	Program pengelolaan dan pengembangan drainase				

1.	Kirmis saluran	Rw.03 desa sindangsuka	Pengelolaan dan pengembangan system drainase	500.000.000 500 m ²	PUPR
3.	Program penataan bangunan gedung				
1.	Pembangunan madrasah nurul qolbi	Kp. Rancabatu Rt.03 Rw.07 desa Cibat	Peningkatan sarana peribadatan yang representatif	300.000.000 2 lokal	Disperkim
2.	Rehab madrasah	Rw 10 desa kerese	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan	115.000.000 1 unit	Disperkim
3.	Renovasi madrasah	Kp. Wedasari Rt.02 Rw.04 desa mekarsari	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan	100.000.000 1 paket	Disperkim
4.	Pembangunan yayasan Al-amanah	Kp. Sindangkerta Rw.01 desa kertajaya	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan	200.000.000 240 m ²	Disperkim
3.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
1.	Rehab Mesjid	Kp. Cidangdeur Girang rt.03 rw.04 desa girimukti	Peningkatan sarana keagamaan untuk cegah kumuh	200.000.000 1 unit	Disperkim
4.	Program pengelolaan persampahan				
1.	Pengadaan kendaraan angkutan sampah roda 3	Dusun 1,2 dan 3 desa kertajaya	Peningkatan pengelolaan sampah	240.000.000 3 unit	Disperkim
5.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
1.	Pembangunan MCK	Kp. Pondok salam Rw.14 desa kertajaya	Peningkatan kualitas pembangunan hunian/pemukiman	50.000.000 1 unit	Disperkim
6.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
1.	Pembangunan desa digital	Desa wanakerta	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	100.000.000 1 paket	diskominfo
2.	Rehabilitas rumah tidak layak huni	Se desa wanakerta	Pemenuhan peningkatan kualitas lingkungan permukiman produktif	975.000.000 65 unit	Disperkim
3.	Rehabilitas rumah	Dusun 1,2 dan	Pencegahan	320.000.000	Disperkim

	tidak layak huni	3 desa cibatu	permukiman kumuh	26 unit	im
4.	Pembangunan rutilahu	Desa keresek	Pencegahan permukiman kumuh	3.500.000.000 140 unit	Disperkim
7.	Program penyelenggaraan jalan				
1.	Hotmix jalan poros desa wanakertapadasuka	Kp. Babakan cau rw.08 desa wanakerta	Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi	750.000.000 2000m ²	PUPR
	Pembangunan pembukaan jalan deas poros dusun	Rw.01-03 desa padasuka	Meningkatkan konektivitas wilayah and mobilitas dalam pendukung pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan produktifitas	300.000.000 1000 m ²	PUPR
	Peningkatan jalan desa	Rw.04,08,10 desa padasuka	Meningkatkan kemajuan pembangunan desa	400.000.000 1050 m ²	PUPR
	Jalan desa	Kp. Babakan Rw.07, 05 desa sukalilah	Infrastruktur jalan desa	300.000.000 800 m ²	PUPR
	Pembangunan jembatan desa	Kp. Cipancar Rt.02 Rw.04 desa cibunar	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	100.000.000 8 m ²	PUPR
	Rehabilitasi jalan desa	Kp. Babakan loa Rt.01 Rw.03 desa cibatu	Peningkatan aksesibilitas sarana pembangunan desa	700.000.000 700 m ²	PUPR
	Pengerasan jalan desa	Rw.4 dan Rw.13 desa sindangsuka	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	150.000.000 600 m ²	PUPR
	Pembangunan jalan desa	Rw.08 dan Rw.13 desa sukalilah	Peningkatan infrastruktur jalan desa	250.000.000 700 m ²	PUPR
	Pembangunan jalan desa	Rw.03/05 desa keresek	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	400.000.000 800 m ²	PUPR
8.	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum				
1.	Pembangunan bak sampah sementara (TPS)	Rw.01 s/d 16 desa keresek	Pencegahan pemukiman kumuh	200.000.000 16 paket	DLH
2.	Peningkatan gedung desa	Desa padasuka jl. Cibatu-bandrek		500.000.000 1 paket	PUPR
9.	Program pengelolaan sumber daya alam				

1.	Sumur dalam tanah	Kp. Cileles Rt.02 Rw.04 desa cibunar	Optimalisasi sumber daya alam	100.000.000 1 paket	Disperkim
10.	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air				
1.	Pipanisasi	Kp. Cigaluh Rw. 10 desa mekarsari	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air di daerah	300.000.000 2000 m ²	Disperkim
2.	Sumur bor	Rw.01 s/d Rw desa sindangsuka	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air di daerah	450.000.000 26 unit	Disperkim
11.	Program rehabilitasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU				
1.	PJU jalan desa dusun	Rw.01,02,09 dan 10 desa mekarsari	Pemerataan infrastruktur secara merata	150.000.000 40 titik	PUPR
12.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian				
1.	Pembangunan jaringan irigasi desa	Kp. Cicantel Rw.10 desa girimukti	Peningkatan hasil pertanian	300.000.000 500 m ²	PUPR
13.	Program pengembangan perumahan				
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Kp. Bungarungkup Rt.01 Rw.11 desa girimukti	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman produktif	200.000.000 500 m ²	Disperkim
2.	Pembangunan jalan tembus Rw.04 danRw.09 conggang	Rw.04 dan Rw.09 desa mekarsari	Peningkatan mobilitas masyarakat	400.000.000 200x2x0,20	PUPR
JUMLAH				30.521.322.000	

Sumber: hasil infut SIPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahana Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahana Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;

4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cibatu mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan
Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :
3. Indeks kepuasan masyarakat
4. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cibatu
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	81
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	88%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber: Renstra Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Cibatu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cibatu sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cibatu diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cibatu merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cibatu diimplentasikan untuk mencapai target –target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan, Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cibatu. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih

mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cibatu diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cibatu sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cibatu melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cibatu Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cibatu sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cibatu dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 2.881.186.828,-

Adapun Program Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cibatu pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.4.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 3.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 6.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa

6.1.2 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

6.1.3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Unit Organisasi : Kecamatan Cibatu
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Cibatu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	H asil Kegi atan				Tolok Ukur	Target					
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN																
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 Dokumen	100 %	43,351,220	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	500,000

						yang tepat waktu	DPA-SKPD									yang tepat waktu		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	100 %	500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,817,899,277					1,999,942,755
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang/bul	an100 %	1,812,684,777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,993,953,255

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 laporan	100 %	5,214,500		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,989,500
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18,653,500		25,080,000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	29 Paket	100 %	8,653,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8,580,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	3 orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							276,443,421		218,528,489			

7	0	0	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Paket	100 %	11,802,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	12,984,704
7	0	0	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Paket	100 %	156,527,321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	77,763,087
7	0	0	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Paket	100 %	6,841,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	6,679,200

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 % 100 %	1 Paket	100 %	27,912,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 dokumen	100 %	7,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	8,933,938
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 laporan	100 %	29,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	42,592,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 % 100 %	1 laporan	100 %	27,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	59,575,560
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	8,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	10,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							86,328,210				56,825,799	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 Laporan	100 %	25,292,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	29,348,429

7	0	0	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 Laporan	100 %	6,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	7,613,320
7	0	0	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 Laporan	100 %	54,395,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	19,864,050
7	0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61,189,700				66,868,213	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 % 100 %	13 Unit	100 %	37,189,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	29,325,391
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 % 100 %	3 Unit	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	37,542,822

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								163,244,000					266,872,203
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								114,365,000					209,453,662
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 Dokumen	80 %	114,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	100 %	209,453,662
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								48,879,000				57,418,541	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	9 Dokumen	80 %	48,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	100 %	57,418,541
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								22,086,000				21,329,638	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								8,106,000				8,591,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkalsannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	8 kali	8,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	8,591,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								13,980,000				12,738,638	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	260 orang	80 %	13,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	100 %	12,738,638
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								159,575,400				177,531,200	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								159,575,400				177,531,200	

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	44.7 %	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	117,031,200
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 laporan	44.7 %	51,575,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60,500,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							200,000,000					240,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							200,000,000						240,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	1 Dokumen	80 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	240,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							29,416,100					32,698,859	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							29,416,100						32,698,859
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	80 %	8,351,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	9,592,033

7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	100 %	2 Laporan	80 %	13,236,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	14,720,195	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	80 %	7,828,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	8,386,631	
TOTAL															2,881,186,828			3,112,778,765

Sumber: Hasil Infut SIPD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.881.186.828,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.306.865.328,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan

Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 46.351.220,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

3. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

4. Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.817.899.277,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.653.500,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 276.443.421,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 86.328.210,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 61.189.700,-

Keluaran : 1. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
2. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 163.244.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di

Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 85 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 114.365.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 85 (Baik)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 48.879.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 85 (Baik)

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.106.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
2. Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.106.000,-

Keluaran : Jumlah monitoring pemberdayaan desa

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 100%

Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu

Kegiatan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 159.575.400,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 159.575.400,-
Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75
Sasaran : Kantor Kecamatan Cibatu
Kegiatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 29.416.100,-
Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

6. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 1 Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 29.416.100,-
Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif (penyusunan Dokumen RPTK)
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibatu

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 2.881.186.828,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Cibatu. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01						2,881,186,828						3,112,778,765					
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	%	%	100 %	2,306,865,328			100 %	2,374,346,865			
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	46,351,220			1 Dokumen	7,101,610			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	43,351,220	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	4,101,610	Kec Cibatu
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	500,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500,000	Kec Cibatu

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500,000	Kec Cibatu
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500,000	Kec Cibatu
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	500,000	Kec Cibatu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	500,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	500,000	Kec Cibatu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	500,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	500,000	Kec Cibatu
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akhrit Tahun	laporan		laporan	1 laporan	1,817,899,277						1 laporan	1,999,942,755	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,812,684,777	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	14 Orang/bulan	1,993,953,255	Kec Cibatu	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	5,214,500	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu			7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 laporan	5,989,500	Kec Cibatu	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	bulan		12 bulan	18,653,500						12 bulan	25,080,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	8,653,500	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	29 Paket	8,580,000	Kec Cibatu	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 orang	10,000,000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	3 orang	16,500,000	Kec Cibatu	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapankantor yang memadai	item %	item %		7 item 100 %	276,443,421							7 item 100 %	218,528,489	

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11,802,200	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	12,984,704	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	156,527,321	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	77,763,087	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6,841,600	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	6,679,200	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	27,912,300	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Paket	0	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 dokumen	7,455,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 dokumen	8,933,938	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	29,470,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 laporan	42,592,000	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	27,900,000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 laporan	59,575,560	Kec Cibatu
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	8,535,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	10,000,000	Kec Cibatu

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	86,328,210						100 %	56,825,799	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,292,400	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	29,348,429	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,640,000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	7,613,320	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	54,395,810	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Laporan	19,864,050	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	61,189,700						100 %	66,868,213	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	37,189,700	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	13 Unit	29,325,391	Kecamatan Cibatu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	24,000,000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	3 Unit	37,542,822	Kecamatan Cibatu

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh kecamatan	%	%	100 %	163,244,000						100 %	266,872,203	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Keagamaan jumlah Laporan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah laporan lomba desa Jumlah laporan Pembinaan dan Monitoring jumlah laporan Penanggulangan Covid- 19 Jumlah laporan pengelolaan PBB Jumlah laporan pengumpulan, pengolahan data di kecamatan Penyelenggaraan Upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya	laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan	laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	114,365,000					1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	209,453,662		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	114,365,000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	209,453,662	Kecamatan Cibatu
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan di Kecamatan	laporan	laporan	7 laporan	48,879,000						7 laporan	57,418,541	

7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				9 Dokumen	48,879,000	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	9 Dokumen	57,418,541	Kecamatan Cibatu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	%	100 %		22,086,000						100 %	21,329,638	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	kali	kali	8 kali		8,106,000						8 kali	8,591,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan		8,106,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	8,591,000	Kecamatan Cibatu
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa Jumlah Pelaksanaan Monitoring/ Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen kali	Dokumen kali	1 Dokumen 4 kali		13,980,000						1 Dokumen 4 kali	12,738,638	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan			260 orang		13,980,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	260 orang	12,738,638	Kecamatan Cibatu
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100 %		159,575,400						100 %	177,531,200	

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	159,575,400						100 %	177,531,200	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	108,000,000	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Cibatu	1 Laporan	117,031,200	Kecamatan Cibatu
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 laporan	51,575,400	Kab. Garut, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Cibatu	1 laporan	60,500,000	Kecamatan Cibatu
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	200,000,000						100 %	240,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	kali		kali	1 kali	200,000,000						1 kali	240,000,000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Garut, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kantor Kecamatan	1 Dokumen	240,000,000	Kecamatan Cibatu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	%		%	100 %	29,416,100						100 %	32,698,859	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	bulan		bulan	12 bulan	29,416,100						12 bulan	32,698,859		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	8,351,400	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	11 desa kecamatan cibatu	1 Dokumen	9,592,033	Kecamatan Cibatu	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	13,236,500	Kab. Garut, Cibatu, Cibatu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	11 desa kecamatan cibatu	2 Laporan	14,720,195	Kecamatan Cibatu	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 dokumen	7,828,200	Kab. Garut, Cibatu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	11 desa kecamatan cibatu	1 dokumen	8,386,631	Kecamatan Cibatu	
TOTAL											2,881,186,828								3,112,778,765	

BAB V

P E N U T U P

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Cibatu mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Cibatu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cibatu akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDI GUNAWAN